

DIPLOMASI PUBLIK MELALUI WISATA HALAL KOTA TANJUNGPINANG UNTUK MENARIK KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA TAHUN 2019

Beti Rangga Sari¹, Syuzairi², Glory Yolanda Yahya³
betirangga.28@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

This study discusses the application of halal tourism located in Tanjungpinang City, Riau Island Province. Riau Islands has a strategic location because it's close to Singapore and Malaysia, which makes the Riau Islands Province a Cross-Border Tourism destination and has great tourism potential. This research aims to describe the development of halal tourism destinations by the Tanjungpinang City Government in strengthening the branding of halal tourism in Tanjungpinang City to increase foreign tourist visits. To find out these problems, the authors applied in-depth qualitative research methods by conducting observation methods, interviewing the concepts of tourism politican economy, public diplomacy, as well as mation branding and place branding. This study show an overview of the concept of halal tourism in Tanjungpinang City and how the Tanjungpinang Government in developing this halal tourism concept using standards contained in the IMTI (Indonesia Muslim Travel Index). This study is based on the standards contained in IMTI. The result of this study shows that Tanjungpinang City is ready to implement halal tourism destinations and it also can be proven from the success of Tanjungpinang City in obtaining a charter award as a leading halal tourism destination at the Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) award ceremony in 2019. However, even though this award was successfully obtained, the problems such as certification and disagreements this problem must be addresses immediately, by educating business owners about the importance of halal certification. In addition, there is a need for deliberation between stakeholders to equalizing an understanding of halal tourism.

Kata kunci: *Halal Tourism, IMTI, Tanjungpinang City.*

I. Pendahuluan

Indonesia memang memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa di setiap daerahnya, salah satunya yaitu daerah Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Tanjungpinang, yang memang dikenal dengan wisata sejarahnya. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam dan Brunei. Daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar, terutama dalam bidang kepariwisataan. Selain itu, pada saat ini Provinsi Kepulauan Riau sudah ditetapkan sebagai kawasan penerapan destinasi wisata halal, dimana konsep wisata halal ini sekarang memang menjadi perhatian serius dari Kementerian Pariwisata Indonesia. Kepulauan Riau sendiri ditetapkan sebagai destinasi wisata halal unggulan dari Kementerian Pariwisata Indonesia melalui surat menteri, hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dan terdapat berbagai destinasi wisata unggulan yang mengandung nilai kebudayaan dan sejarah yang

dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Salah satu destinasi yang menjadi wisata halal unggulan di Kepulauan Riau yaitu di Kota Tanjungpinang. Di Kota Tanjungpinang sendiri memiliki beberapa kawasan yang dijadikan kawasan wisata halal unggulan, seperti Gedung Gonggong dan Pulau Penyengat yang merupakan kawasan cagar budaya nasional dan merupakan daerah pusat kajian Melayu Islam.

Pengembangan wisata halal di Kota Tanjungpinang dari Kementerian Pariwisata Indonesia ini selain karena melihat potensi yang dimiliki daerah ini, Kementerian Pariwisata juga melihat lemahnya standar pariwisata yang ada, yang mengakibatkan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara banyak yang hanya menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai tempat transit, bukan dijadikan sebagai tempat untuk berwisata. Hal inipun membuat Kementerian Pariwisata Indonesia melakukan pengukuran terhadap pariwisata di Kota Tanjungpinang, sebelum akhirnya memutuskan untuk menetapkan Kota Tanjungpinang sebagai salah satu daerah destinasi wisata halal di Kepulauan Riau. Konsep destinasi wisata halal ini dinilai sebagai langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan pada era globalisasi saat ini wisata halal memang menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan muslim. Pegetahuan dan kesadaran akan produk halal membuat pertumbuhan industri halal semakin terus meningkat (Hamdan *et al.* 2013 dan Rahman *et al.* 2013). Meningkatnya industri halal tersebut memunculkan wisata halal sebagai fenomena yang baru (Samori *et al.*, 2016).

Wisata halal ini bertujuan untuk menarik wisatawan, terutama wisatawan muslim, baik itu wisatawan dalam negeri (wisatawan nusantara) ataupun wisatawan luar negeri (wisatawan mancanegara). Di Indonesia sendiri, selain untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, pengembangan pariwisata halal ini juga bertujuan untuk memberikan kualitas destinasi wisata halal nasional yang lebih baik, mewujudkan Indonesia menjadi tujuan wisata favorit dunia, meningkatkan kualifikasi kelembagaan wisata halal nasional, dan menjadikan industri halal Indonesia yang kompetitif. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pun membuat badan khusus yang disebut dengan Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H), dimana tim ini memiliki wewenang untuk membantu pemerintah dalam memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman bagi daerah yang mempunyai potensi untuk mengembangkan wisata halal. Salah satu cara yang dilakukan TP3H yaitu dengan membentuk IMTI yang diadopsi dari GMTI. Jadi IMTI ini yang akan menjadi panduan bagi setiap daerah pengembangan destinasi wisata halal di Indonesia untuk mengembangkan destinasi wisata halal mereka, termasuk Kota Tanjungpinang.

Tingginya minat wisatawan terhadap wisata halal dan letaknya yang strategis dapat membuat Kota Tanjungpinang memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Pengembangan destinasi wisata halal di Kota Tanjungpinang ini dirasa juga sangat perlu untuk dilakukan, karena adanya pengembangan ini dapat membantu destinasi wisata Tanjungpinang dalam menaikkan standar destinasi wisata yang dimiliki dengan mengikuti standar yang terdapat pada IMTI. Karena mengingat selama ini, standar yang dimiliki destinasi Kota Tanjungpinang bisa dibilang masih lemah. Hal ini tentu juga akan berdampak pada kunjungan wisatawan, terutama wisatawan muslim yang berasal dari Malaysia dan Singapura, dimana dua negara ini memang dijadikan pangsa pasar utama dalam setiap penerapan wisata di Kota Tanjungpinang.

Melalui tinjauan teori ekonomi politik pariwisata dan diplomasi publik, akan menjadi pendukung jawaban dari permasalahan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Tanjungpinang dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Sehingga ini juga bisa memberikan jawaban dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui konsep wisata halal yang digunakan Kota Tanjungpinang, dan bagaimana diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui wisata halal ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam metode kualitatif ini, kata-kata dan data-data bukan atas perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya (Meleong, 2014:3). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi langsung ke tempat penelitian atau ke objek penelitian untuk dapat melihat secara langsung keadaannya, wawancara dengan beberapa pihak, baik itu pemerintahan ataupun non pemerintahan yang sudah ditentukan menjadi informan dan bisa memberikan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dokumentasi. Untuk analisis data, dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman. Teknik analisis dari Miles dan Huberman ini melewati berbagai tahapan data seperti: reduksi data (*data reduction*), dimana data-data yang sudah didapatkan peneliti di lapangan kemudian dikelompokkan dan dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penyajian data (*data display*), dimana pada tahap ini peneliti akan menjabarkan data yang sudah didapatkan selama proses wawancara di lokasi penelitian dalam uraian teks narasi. Selain itu dalam beberapa konteks peneliti juga akan menyajikan data dalam bentuk kolom ataupun bagan, Penarikan kesimpulan (*conclusion*), penarikan kesimpulan dapat bersifat sementara, maksudnya jika dalam pengumpulan data yang dimiliki peneliti saat ini ditemukan bukti tidak valid dengan data hasil yang dikumpulkan selanjutnya maka kesimpulan ini akan diubah sesuai data yang valid, hal ini agar penelitian yang dilakukan peneliti bisa menjawab rumusan masalah dengan sebenar-benarnya.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam ekonomi politik pariwisata, menjelaskan bahwa regulasi haruslah dibuat dengan seperangkat aturan dan tren yang ada pada saat ini. Hal ini dimaksudkan agar pariwisata yang ada tetap mampu bersaing dengan pariwisata di negara lain, karena mengingat dunia pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian negara. Seperti yang dikatakan oleh Drs. Usmar Salam, “dengan besarnya dampak dunia pariwisata terhadap ekonomi suatu bangsa atau negara maka setiap negara wajib membuat kebijakan untuk memajukan dunia pariwisata dengan berbagai macam cara”. Oleh karena itu lah, Pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan dalam dunia pariwisata yang sesuai dengan tren yang ada pada saat ini, salah satunya yaitu dengan menerapkan halal tourism atau wisata halal. Penerapan wisata halal ini juga merupakan bentuk diplomasi publik dari pemerintah Indonesia, dimana dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menggunakan dunia pariwisata untuk mempromosikan atau menanamkan citra baik yang dimiliki Indonesia kepada publik di luar negeri.

Diplomasi publik dalam konteks ini juga dimaksudkan dengan penggunaan wisata halal sebagai instrumen yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan muslim mancanegara. Sesuai dengan konsep wisata halal, yaitu wisata yang ramah bagi wisatawan muslim, dimana ini memiliki arti bahwa destinasi wisata halal ini dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai seorang muslim, baik dari kebersihan, kenyamanan, ketertiban dan kesehatan tanpa melupakan tujuan dari berwisata tersebut. Konsep ini dibuat sejalan dengan tujuan dari diplomasi publik, dimana salah satunya yaitu meningkatkan keakraban dan membuat masyarakat berfikir dan mengubah *image* persepsi mereka tentang negara serta memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang bagaimana negara tersebut.

Untuk membantu diplomasi dalam wisata halal ini, dibutuhkan promosi yang baik. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menjadi salah satu daerah pengembangan wisata halal di Indonesia, telah melakukan beberapa kegiatan promosi sebagai salah satu bentuk dari diplomasi, yaitu festival Pulau Penyengat. Festival ini bertujuan untuk lebih mengenalkan destinasi wisata dan

kebudayaan Pulau Penyengat, dan selain itu, festival ini juga bertujuan untuk menjaring wisatawan mancanegara di wilayah perbatasan, terutama wisatawan yang berasal dari Singapura dan Malaysia.

Dunia Pariwisata bisa dianggap sebagai cara yang efektif dalam pelaksanaan upaya diplomasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dalam dunia pariwisata yang tanpa paksaan, dan pariwisata dianggap lebih mudah untuk diterima masyarakat luas karena mengandung nilai-nilai yang universal, seperti adanya nilai budaya, tradisi, agama, sejarah dan nilai-nilai lainnya. Namun dalam dunia pariwisata juga harus memperhatikan tren yang ada pada saat ini, agar pariwisata di negeri ini tetap mampu bersaing dengan pariwisata di negara lainnya.

Adanya wisata halal yang diterapkan Pemerintah Indonesia ini, diharapkan dapat merangkul dan mendorong masyarakat internasional untuk dapat melihat negara Indonesia sebagai tujuan yang menarik dan baik untuk dijadikan destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Dalam hal ini, untuk mencapai harapan tersebut, kesungguhan dari pemerintah menjadi hal yang sangat utama. Dan oleh sebab itu lah, Kementerian Pariwisata Indonesia, melakukan kerja sama dengan *Crescent Rating*, untuk mengembangkan sebuah indeks yang akan memberikan standar dan pengukuran pertumbuhan 10 provinsi yang dirancang untuk pariwisata halal di Indonesia (Riska. D dan Retno.S, 2019). Indeks ini disebut dengan IMTI (Indonesia Muslim Travel Index) yang diluncurkan pada Juni 2018 di Jakarta, dimana standar atau pengukuran yang digunakan di dalam IMTI ini diadopsi dari *Global Muslim Travel Index* (GMTI).

GMTI merupakan penyedia data berbasis wawasan yang diperkenalkan oleh *Mastercard* dan *Crecentrating* pada tahun 2015, dimana GMTI ini dibuat untuk membantu negara destinasi wisata, jasa perjalanan, dan juga investor untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan segmen wisata muslim global. Selain itu, di dalam GMTI ini juga memuat standar-standar yang digunakan dalam pengembangan wisata halal global. Hal ini juga sangat penting, terutama bagi negara-negara destinasi wisata, contohnya Indonesia. Melalui indeks ini, daerah-daerah pada negara destinasi wisata dapat mengukur sejauh mana kesiapan dan kemajuan destinasi daerah tersebut dalam menyambut atau membangun wisata halal atau wisata ramah muslim (Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019 – 2020). Adapun standar-standar yang digunakan dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) ini yaitu:

1. *Access*, terdiri dari *visa requirements*, *air connectivity*, dan *transport infrastructure*.
2. *Communication*, terdiri dari *outreach*, *ease of communication*, dan *digital presence*.
3. *Environment*, terdiri dari *safety dan culture*, *visitor arrivals*, dan *enabling climate*.
4. *Services*, terdiri dari *core needs (halal food dan prayers)*, *core services (hotel and airports)*, dan *unique experiences*.

Standar- standar inilah yang dijadikan standar dalam pengembangan wisata halal global, dan juga digunakan dalam pengembangan wisata halal di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata halal di Indonesia melalui program IMTI. Di mana IMTI ini merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan pariwisata halal Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. IMTI sendiri dibuat dengan tujuan agar setiap daerah dapat mempersiapkan destinasi yang ada untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan yang berkualitas dan agar destinasi setiap daerah bisa mengenali apa kekuatan dan kelemahannya berdasarkan standar pariwisata halal global.

Adanya IMTI ini juga merupakan salah satu cara untuk membantu negara melakukan diplomasi melalui pariwisata dengan konsep wisata halal. Dimana IMTI ini sendiri dibuat agar setiap daerah penerapan, mampu untuk meningkatkan standar destinasi wisata yang dimiliki. Hal ini agar memunculkan citra baik destinasi tersebut dan dapat menjadi daya tarik di mata wisatawan mancanegara. Hal ini sejalan dengan tujuan dari diplomasi publik yang disebutkan oleh Mark Leonard dalam bukunya yang berjudul *Public Diplomacy*. Dimana Mark menyebutkan bahwa ada beberapa poin yang menjadi tujuan dari diplomasi, salah satunya yaitu merangkul dan memberi dorongan kepada masyarakat untuk melihat suatu negara sebagai tujuan yang menarik bagi pariwisata, mempengaruhi sikap masyarakat dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap posisi

negara tersebut, dan meningkatkan keakraban dan membuat masyarakat berfikir dan mengubah *image* persepsi mereka tentang negara, serta memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang bagaimana negara tersebut.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang terdapat dalam IMTI, tim percepatan dan pengembangan pariwisata halal Kementerian Pariwisata telah dapat mengidentifikasi 10 provinsi yang memenuhi atau mendekati kriteria-kriteria dalam IMTI yang diurutkan berdasarkan ranking. 10 provinsi tersebut yaitu:

Tabel 1. Posisi Destinasi Pariwisata Halal Unggulan Indonesia Tahun 2018 – 2019

No	Destinasi	IMTI Rank	IMTI Score	IMTI Rank	IMTI Score
1	Lombok	1	58	1	70
2	Aceh	2	57	2	66
3	Jakarta	3	56	4	59
4	Sumatera Barat	4	55	5	59
5	Yogyakarta	5	51	7	52
6	Jawa Barat	6	51	6	52
7	Kepulauan Riau	7	50	3	63
8	Jawa Timur (Malang Raya)	8	48	9	49
9	Jawa Tengah	9	47	8	49
10	Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya)	10	30	10	33

Sumber: Kementerian Pariwisata Indonesia, 2019

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa adanya IMTI ini bisa dijadikan sebagai pacuan bagi pemerintah dari masing-masing daerah penerapan wisata halal di Indonesia untuk semakin melakukan pengembangan dan perbaikan agar destinasi halal daerah mereka semakin membaik dan mendapatkan posisi yang baik juga di Indonesia. Ini terbukti dari beberapa destinasi daerah yang berhasil menempati posisi tiga besar, dimana sebelumnya destinasi daerah nya bahkan belum berhasil memasuki lima besar destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Contohnya yaitu Kepulauan Riau, pada tahun 2018, Kepulauan Riau hanya berhasil menduduki posisi ke tujuh dengan *score* 50, kemudian pada tahun 2019, Kepulauan Riau berhasil menduduki posisi ke tiga, dengan *score* 63. Ini berarti setiap daerah memiliki daya saing untuk meningkatkan standar IMTI ini.

Adanya penerapan destinasi di beberapa daerah Indonesia ini tentu harus diperhatikan dengan serius, terutama dari pemerintah daerah masing-masing. Standar-standar yang terdapat dalam IMTI tetap harus ditingkatkan agar standar destinasi daerah menjadi semakin baik. Sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, karena pengalaman perjalanan yang mengesankan dapat memberikan ingatan yang menyenangkan. Semua ini dilakukan agar dapat menciptakan citra baik yang dapat mempengaruhi wisatawan untuk datang ke destinasi tersebut.

Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menjadi salah satu daerah pengembangan destinasi wisata halal di Kepulauan Riau, standar yang terdapat di dalam IMTI merupakan hal yang harus diperhatikan, karena dengan adanya IMTI ini dapat membantu pemerintah kota dalam meningkatkan standar destinasi yang ada. Terlebih lagi, destinasi Kota Tanjungpinang yang memang

memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata halal. Jadi akan sangat disayangkan kalau potensi yang dimiliki tersebut tidak diiringi dengan standar wisata yang baik. Apalagi Kota Tanjungpinang tepatnya Pulau Penyengat sudah ditunjuk sebagai *pilot project* destinasi wisata halal di Kepulauan Riau.

Penunjukkan Pulau Penyengat sebagai *pilot project* penerapan destinasi wisata halal di Kepulauan Riau ini merupakan bagian dari *place branding* yang dilakukan oleh pemerintah, dimana penunjukan ini dikarenakan Pulau Penyengat yang memang sudah dikenal masyarakat luas, bukan hanya masyarakat di sekitaran Kota Tanjungpinang, tapi juga masyarakat yang berada di Singapura dan Malaysia. Hal ini dikarenakan sejarah Pulau Penyengat yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak dan Lingga. Jadi tidak heran jika di Pulau Penyengat ini banyak terdapat situs-situs bersejarah yang masih ada sampai saat ini. Bahkan sejak tanggal 19 Oktober 1995, Pulau Penyengat dan kompleks istana di Pulau Penyengat ini telah dicalonkan ke UNESCO untuk dijadikan salah satu situs warisan dunia.

Pada tahun 2019, Kota Tanjungpinang berhasil dianugerahkan piagam penghargaan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia sebagai destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Piagam ini di berikan kepada Tanjungpinang, juga berdasarkan standar yang terdapat dalam IMTI. Dimana disini, Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan pendataan sesuai aspek dan kriteria yang ada. Adapun aspek dan kriteria yang dimaksud yaitu:

Tabel 2. IMTI Data Collection Sheet 2019

<i>Aspects</i>	<i>Criteria</i>	<i>Sub-Criteria</i>
<i>Access (10 %)</i>	<i>Air connectivity</i>	Jumlah bandara dan kapasitas kursi.
	<i>Transportation infrastructure</i>	Tersedianya jasa kereta api, bus umum, kepadatan jalan secara keseluruhan, dan jalan beraspal.
		Tersedianya terminal kapal pesiar.
	<i>Visa requirements</i>	Negara <i>visa on arrival</i> .
<i>Communication (15%)</i>	<i>Oustreach</i>	Jumlah buku panduan bagi wisatawan muslim.
		Jumlah <i>workshop</i> yang sudah dilaksanakan.
		Jumlah kegiatan pemasaran yang sudah dilaksanakan.
	<i>Ease of communication</i>	Jumlah SDM pariwisata bersertifikasi.
	<i>Digital presence</i>	Kampanye digital bagi wisatawan muslim yang sudah dilaksanakan.
<i>Environment (30%)</i>	<i>Muslim visitor arrivals</i>	Jumlah kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara.
	<i>Safety and culture</i>	<i>Safety</i>

		<i>Culture</i>
	<i>Enabling climate</i>	<i>Muslim friendly atraccion</i> Tingkat cakupan wifi (bandara, kota, dll). Komitmen dalam pengembangan wisata halal.
<i>Services (45%)</i>	<i>Dining options and halal assurance</i>	Jumlah restoran yang bersertifikat halal dan jumlah restoran yang dijamin halal (tidak bersertifikat halal).
	<i>Access to prayer spaces</i>	Jumlah masjid / musholla.
		Jumlah musholla (bandara dan tempat umum), banyaknya sholat jumat yang sudah dilaksanakan di musholla bandara.
		Jumlah masjid / musholla di tempat perbelanjaan,
	<i>Accommodation options</i>	Jumlah hotel Syariah, jumlah hotel dengan dapur yang bersertifikat halal, jumlah hotel yang tidak menyediakan alkohol.
Jumlah spa.		
	<i>Unique experience</i>	<i>Unique experience</i>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2019

Adanya pengembangan destinasi wisata halal berdasarkan standar IMTI yang disesuaikan dengan standar pada GMTI ini, membuat standar destinasi yang dimiliki Kota Tanjungpinang semakin membaik. Hal ini juga membuat tujuan dikembangkannya destinasi wisata halal ini mulai tercapai. Adapun tujuan utama dari pengembangan destinasi wisata halal di Kota Tanjungpinang ini yaitu untuk menarik kunjungan wisatawan muslim mancanegara, terutama wisatawan yang berasal dari Singapura dan Malaysia, yang memang menjadi pangsa pasar utama dari pengembangan destinasi wisata halal di daerah ini.

Tabel 3. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk Kota Tanjungpinang, 2019

No	Bulan	2019
1	Januari	8.284
2	Februari	12.262
3	Maret	14.553
4	April	15.027
5	Mei	13.521
6	Juni	17.101
7	Juli	10.785
8	Agustus	14.357
9	September	11.727
10	Oktober	11.347
11	November	12.346
12	Desember	16.332
Total		157.642

Sumber: Imigrasi Kota Tanjungpinang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, setelah pengembangan destinasi wisata halal di Kota Tanjungpinang, kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk Kota Tanjungpinang berhasil mencapai 157. 642 orang. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan adanya destinasi wisata halal ini, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, bukan hanya wisatawan muslim, tetapi juga wisatawan non-muslim. Ini dikarenakan konsep wisata halal yang digunakan dalam pengembangan destinasi wisata halal di Kota Tanjungpinang yang harus memperhatikan kebersihan, suasana tertib, kesehatan (makanan dan minuman higinis), dan juga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan.

Namun meskipun pengembangan destinasi wisata halal yang ada di Kota Tanjungpinang ini bisa dinilai sudah baik, dengan terbuktinya mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata Indonesia, dan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, namun permasalahan belum sepahaminya antara pemangku kepentingan tetap saja terjadi di Kota Tanjungpinang. Ditambah lagi, sarana pendukung yang juga dirasa masih kurang, seperti masih belum adanya penginapan-penginapan berbasis syariah, dan juga dari regulasi dan kebijakan yang salah satunya meliputi sertifikasi halal. Padahal, hal-hal ini merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan bagi wisatawan dalam mengunjungi destinasi wisata halal. Terutama bagi wisatawan dari Malaysia yang menjadi salah satu pangsa pasar utama destinasi wisata halal di Kota Tanjungpinang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tuti, selaku Kepala Seksi Destinasi Bidang Destinasi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, yang mengatakan bahwa “wisatawan muslim yang berasal dari Malaysia biasanya pasti akan melihat apakah tempat makan tersebut terdapat logo halal

atau tidak, namun jika tidak terdapat biasanya mereka akan menanyakan kepada pekerja disana, apakah restoran atau tempat makan tersebut sudah memiliki sertifikasi halal atau belum. Jika belum, biasanya para wisatawan tersebut akan mencari tempat lain”. Hal ini membuktikan bahwa pada penerapan wisata halal ini, sertifikasi halal bagi restoran ataupun tempat makan lainnya menjadi salah satu hal yang sangat penting. Namun pada penerapannya, masih banyak dari pemilik restoran atau tempat makan di Kota Tanjungpinang yang mengabaikan hal tersebut. Hal ini dikarenakan, banyak dari pemilik restoran dan rumah makan di Kota Tanjungpinang yang merasa berat untuk mengambil sertifikasi halal ini, karena harganya yang menurut mereka mahal dan tidak sebanding hanya untuk berlaku dalam jangka kurang lebih dua tahun.

Sertifikasi halal bagi restoran ini memang menjadi masalah penting yang harus diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penerapan wisata halal ini. Perlu adanya kerjasama yang baik dari *stakeholder* dan pemilik restoran agar menanamkan pemikiran pentingnya sertifikasi halal ini. Karena dengan adanya restoran halal yang tersertifikasi, dapat memberikan poin lebih pada pelayanan bagi restoran atau rumah makan tersebut. Selain itu, semakin banyaknya restoran atau rumah makan yang memiliki sertifikasi halal tersebut dapat membantu Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang untuk memenuhi komponen dalam penilaian IMTI (Indonesia Muslim Travel Index).

Penerapan wisata halal ini bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Untuk itu, perlu adanya kerjasama yang baik dari pemerintah ataupun non pemerintah. Aktor non pemerintah seperti POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan beberapa himpunan lainnya juga harus ikut andil untuk memajukan destinasi wisata halal di daerahnya. Karena mengingat dalam dunia pariwisata, peran masyarakat terutama pelaku pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan pariwisata daerah.

IV. Kesimpulan

Pada era globalisasi ini, pariwisata dunia mengalami berbagai perkembangan tren, salah satunya yaitu munculnya konsep wisata halal. Konsep ini dibuat karena semakin banyaknya pertumbuhan umat muslim dan adanya kesadaran wisatawan muslim terhadap konsumsi produk dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim ketika mengunjungi tempat wisata. Dibuatnya konsep wisata halal ini agar dapat memberikan fasilitas kebutuhan dasar bagi wisatawan muslim yang akan berkunjung ke sebuah destinasi wisata.

Melihat peluang yang ada dari penerapan wisata halal, membuat banyak negara menerapkan konsep wisata halal ini, salah satunya yaitu Indonesia. Dalam hal ini, bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia, Kementerian Pariwisata Indonesia bersama dengan *Crecentrating* membuat sebuah indeks yang diberi nama IMTI, dimana IMTI ini memuat standar-standar yang dapat menjadi acuan untuk menaikkan standar destinasi wisata halal yang ada. Standar-standar yang terdapat dalam IMTI sendiri pun sudah berdasarkan standar yang terdapat dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI).

Di Indonesia sendiri, penerapan wisata halal ini di mulai sejak tahun 2015, dan diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia. Kepulauan Riau ditunjuk menjadi salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dan memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Dalam penetapan wisata halal di Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, tepatnya Pulau Penyengat dijadikan sebagai *pilot project* destinasi wisata halal. Hal ini dikarenakan Pulau Penyengat yang memang menjadi kawasan cagar budaya nasional dan merupakan daerah yang memiliki peran penting sebagai pusat kajian Melayu Islam.

Dalam pencaanangan wisata halal di Kota Tanjungpinang, berdasarkan standar yang terdapat pada IMTI, Kota Tanjungpinang bisa dikatakan sudah siap untuk menerapkan destinasi wisata halal, dan ini bisa dibuktikan dari berhasilnya Kota Tanjungpinang memperoleh piagam penghargaan sebagai destinasi wisata halal unggulan pada acara Penghargaan *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) tahun 2019. Selain itu, ini juga dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara setelah pengembangan destinasi wisata halal di Kota Tanjungpinang. Banyaknya kunjungan wisatawan ke Kota Tanjungpinang ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan diplomasi dengan baik. Namun meskipun demikian, masalah regulasi dan kebijakan juga menjadi hal yang dirasa perlu untuk ditingkatkan kembali, terutama mengenai sertifikasi halal. Ditambah lagi, sarana pendukung yang juga dirasa masih kurang, seperti masih belum adanya penginapan-penginapan berbasis Syariah.

Masalah-masalah yang disebutkan diatas merupakan hal-hal yang harus segera di tangani oleh pemerintah setempat. Hal ini karena masalah-masalah yang ada ini merupakan hal-hal yang menjadi komponen penilaian dalam IMTI. Dengan kata lain, jika masalah ini tidak diatasi dengan baik, maka hal ini akan dapat mempengaruhi ranking Kepulauan Riau dalam posisi IMTI. Bahkan bukan tidak mungkin ini juga akan membuat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara, karena mengingat standar yang digunakan dalam program IMTI ini merupakan pengadopsian dari standar dalam GMTI.

V. Daftar Pustaka

Buku-buku

Leonard, M., Catherine, S, dan Conrad, S. 2002. *Public Diplomacy*. Foreign Policy Centre. London.
Mas'ood, M. 2008. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Moleong, Lexy.J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remka. Bandung.

Dokumen / Laporan

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2020. Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020. <https://knks.go.id>. Diakses pada 10 Agustus 2021.

Jurnal dan Skripsi/Tesis/Disertasi

Destiana, R., dan Astuti, R. S. 2019. Pengembangan Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Conference on Public Administration and Society* 1(1): 331-353.
Hamdan, H., Issa, Z. M., Abu, N, dan Jusoff, K. 2013. Purchasing of Processed Halal Food Products. *Journal of Food Products Marketing*. 19 (1): 54-61.
Samori, Z., Md Salleh, N.Z, dan Khalid, M.M. 2016 Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. *Tourism Management Perspective*. 19: 131-136.

Internet

Salam, U. *Pariwisata Dalam Hubungan Internasional*. <https://slideplayer.info/amp/13410653>. Diakses pada 3 Juli 2021.